

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220 /O/1981

tentang

Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
 - b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut diatas cukup besar ;
 - c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 44 tahun 1974 ;
 2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/1/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama

- : Menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang baru serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

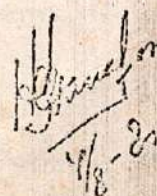
K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat :



1	2	3	4	5	6	7
11	SMP Negeri 165 Jakarta	Filial SMP Negeri 90 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratip Jakarta Timur		
12.	SMP Negeri 166 Jakarta	Filial SMP Negeri 41 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratip Jakarta Selatan		
13.	SMP Negeri 167 Jakarta	Filial SMP Negeri 14 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratip Jakarta Timur		
14.	SMP Negeri 168 Jakarta	Filial SMP Negeri 90 Jakarta	Cakung	Kota Administratip Jakarta Timur		
15.	SMP Negeri 169 Jakarta	Filial SMP Negeri 32 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratip Jakarta Barat		
16.	SMP Negeri 170 Jakarta	Filial SMP Negeri 114 Jakarta	K o j a	Kota Administratip Jakarta Utara		
17.	SMP Negeri 171 Jakarta	Filial SMP Negeri 49 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratip Jakarta Timur		
18.	SMP Negeri 172 Jakarta	Filial SMP Negeri 511 Jakarta	Cakung	Kota Administratip Jakarta Timur		
19.	SMP Negeri 173 Jakarta	Filial SMP Negeri 114 Jakarta	K o j a	Kota Administratip Jakarta Utara		
20.	SMP Negeri 174 Jakarta	Filial SMP Negeri 36 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratip Jakarta Timur		
21.	SMP Negeri 175 Jakarta	Filial SMP Negeri 98 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratip Jakarta Selatan		
22.	SMP Negeri 176 Jakarta	Filial SMP Negeri 45 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratip Jakarta Barat		
23.	SMP Negeri 177 Jakarta	Filial SMP Negeri 46 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratip Jakarta Selatan		
24.	SMP Negeri 178 Jakarta	Filial SMP Negeri 87 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratip Jakarta Selatan		

1	2	3	4	5	6	7
25	SMP Negeri 179 Jakarta	Filial SMP Negeri 103 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur		
26	SMP Negeri 180 Jakarta	Filial SMP Negeri 91 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur		
27	SMP Negeri 181 Jakarta	Filial SMP Negeri 38 Jakarta	Tanah Abang	Kota Administratif Jakarta Pusat		
28	SMP Negeri 182 Jakarta	Filial SMP Negeri 33 Jakarta	Pangpang Prapatan	Kota Administratif Jakarta Selatan		
29	SMP Negeri 183 Jakarta	Filial SMP Negeri 78 Jakarta	Kemayoran	Kota Administratif Jakarta Pusat		
30	SMP Negeri 184 Jakarta	Filial SMP Negeri 99 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur		
31	SMP Negeri 185 Jakarta	Filial SMP Negeri 19 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan		
32	SMP Negeri 186 Jakarta	Filial SMP Negeri 59 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat		
33	SMP Negeri 187 Jakarta	Filial SMP Negeri 72 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat		
34	SMP Negeri 188 Jakarta	Filial SMP Negeri 3 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur		
35	SMP Negeri 189 Jakarta	Filial SMP Negeri 31 Jakarta	Kebon Jeruk	Kota Administratif Jakarta Barat		
36	SMP Negeri 190 Jakarta	Filial SMP Negeri 132 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat		
37	SMP Negeri 191 Jakarta	Filial SMP Negeri 69 Jakarta	Grogol Petamburan	Kota Administratif Jakarta Barat		
38	SMP Negeri 192 Jakarta	Filial SMP Negeri 81 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur		

- Kaempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain yang akan datang.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI.
26. Sekolah yang bersangkutan.

Sesuai dengan aslinya

Pj. Kepala Biro Perundang-undangan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

REPUBLIC
INDONESIA

(Soejoto, S.H.)

NIP. 130317268